

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL
PEMELIHARAAN PERKEBUNAAAN DI KECAMATAN
KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



UTN SUSKA RIAU

OLEH

M.KHUDRI

NIM 11327100842

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL
PEMELIHARAAN PERKEBUNAAN DI KECAMATAN
KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

M.KHUDRI

NIM 11327100842

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul ***"Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara Pt. Tasmapuja Dan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunan Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar"*** yang ditulis oleh:

Nama : M . KHUDRI
 NIM :11327100842
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 September 2020

Pembimbing Skripsi


MHD. KATSULANI,SH, MH.
 NIP. 196309091992021001

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh :

Nama : **M. KHUDRI**
 NIM : 11327100842
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 September 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Muslim, S.Ag., SH., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

M.KHUDRI
NIM 11327100842

Penelitian ini dilakukan di PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan dan Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan dan apakah hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Observasi dan Kajian Pustaka. Kemudian metode analisa dan penarikan kesimpulan penulis gunakan yaitu Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan, adapun kesimpulan dari penelitian ini yang didapatkan dilapangan yaitu 1) Pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. 2) Adapun hambatan antara lain adalah Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan dalam membuat perjanjian karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa dan kecamatan maupun dinas yang terkait, selain hambatan ada upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu masyarakat lebih memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerjasama pemeliharaan perkebunan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah :1) Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Dinas Perkebunan untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian.

Kata kunci : Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja Dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin ya Rabb..

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga buat Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Muhir dan Ibunda Yusmanidar, beserta keluarga besar terimakasih atas segala jasa dan tak pernah lelah mendidik penulis dan selalu mendukung penulis serta pengertian selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah.
3. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, Bapak Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Drs. H.Suryan A. Jamrah, MA dan Bapak Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Dr. H.Promadi, M.pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Drs. H.Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah, wakil dekan I Bapak Dr. Heri Sundandar, MCL wakil dekan II Bapak Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag dan wakil dekan III Bapak Dr. H.Maghfirah, M.A Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.,MH dan sekretaris ilmu hukum Bapak Muslim, S.Ag.,M.Hum serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Kastulani, SH.,MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Lovelly Dwina Dahren, selaku penasehat akademis yang selalu memberikan masukan dan syaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan kepada seluruh staf pegawai Syariah Dan Hukum.
9. Kepada staf BBPOM Provinsi Riau dan para pihak yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, yang mana telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah Dan Hukum angkatan 2013 terimakasih telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 06 Januari 2020
Penulis

M.KHUDRI
NIM 11327100842



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 12
A. Profil Kabupaten Kampar.....	12
B. Profil Perusahaan.....	16
 BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	 29
A. Pengertian Perjanjian	29
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	33
C. Asas-Asas Perjanjian.....	36
D. Unsur-Unsur Perjanjian.....	40
E. Akibat Perjanjian Yang Sah	42
F. Pelaksanaan Perjanjian.....	43
G. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 51
A. Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ...	53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	62
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja Dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunan Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Populasi dan Sampel	9
Tabel IV.1 Jumlah hutang PT. Tasmapuja dan pemilik perkebunan kelapa sawit	55
Tabel IV.2 Jumlah realisasi dan target pengadaan bahan baku periode tahun 2014-2018	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan II.1. Struktur Organisasi PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	20
Bagan II.2. Proses Produksi Pengolahan Buah Kelapa Sawit pada PT. Tasma Puja Kampar.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Berkat anugerah kesuburan tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.¹ Karakteristik tanah yang gembur membuat tanaman tumbuh subur dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai jual tinggi sehingga berpotensi besar untuk pengembangan pertanian dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbicara tentang pertanian tidak hanya berkaitan dengan sawah dan padi, namun juga komoditas lain yaitu perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan hasil peternakan.²

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan

¹ Ilyas Ismail, 2012, *Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 3.

² Dwimas Suryanata Nugraha. 2018. *Jurnal Ilmu Hukum. Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sumber daya alam secara berkelanjutan.³ Untuk menjaga iklim usaha perkebunan yang kondusif, maka penyelenggaraan usaha perkebunan harus dikelola berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, ketepaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang harus dicapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindakberlakuannya sesuai dengan tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan Negara.⁴

Bidang perkebunan merupakan salah satu bidang yang termasuk ke dalam sumber daya alam di Indonesia yang memiliki peranan strategis dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, karena perkebunan menyongkong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR selalu memposisikan perkebunan sebagai instrumen ekonomi strategis. Mengingat pentingnya bidang ini, Indonesia sebagai Negara agraris yang memiliki penduduk sebesar 37,75 juta jiwa dengan mata

³ Ibid. hlm. 3.

⁴ Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pencarian bertani dan bekebun, maka dianggap perlu merumuskan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dibidang perkebunan.

Untuk itu pada tanggal 19 Februari 2018, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran perkebunan. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran perkebunan ini merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Riau.

Dalam Diktum menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dinyatakan bahwa perkebunan memiliki peranan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Menimbang juga bahwa penyelenggaran perkebunan yang berbunyi :

Penyelenggaran perkebunan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
2. Meningkatkan pendapatan asli Daerah
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar
5. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industry dalam negeri
6. Memberi perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari
8. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perkebunan pada Pasal 10 menyatakan :

1. Perusahaan perkebunan wajib mengikuti dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai sesuatu kekayaan identitas budaya Daerah.
2. Perusahaan perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya.

Adapun pelaksanaan perkebunan Pada PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat yang belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Terkait dengan lahan perkebunan masyarakat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang berada di dekat lahan PT. Tasmapuja dengan luas 3.100 hektare, selaku masyarakat yang memiliki lahan perkebunan telah melaksanakan kesepakatan bersama dengan PT. Tasmapuja dalam hal pemeliharaan perkebunan sawit, masalah pemeliharaan bermula pada saat pemeliharaan perkebunan yang cukup tinggi untuk masyarakat sehingga pelaksanaan perjanjian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama yang mana pihak masyarakat menyerahkan hak pemeliharaan kepada pihak PT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tasmapuja dengan dasar perjanjian setiap penjualan sawit dari hasil perkebunan tersebut akan dijual kepada PT. Tasmapuja.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan pihak PT. Tasmapuja tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dari perjanjian tersebut, dalam perjanjian tersebut masyarakat selaku pemilik perkebunan lahan sawit akan membayar bentuk ganti rugi setelah penjualan dilakukan dengan angsuran yaitu dalam 1 (satu) tahun pembayaran angsuran dilakukan sebanyak empat kali, yaitu panen 2 (dua) bulan untuk pemilik tanah (plasma) dan 1 (satu) bulan untuk PT. Tasmapuja. Sedangkan kenyataan dilapangan masyarakat sering merasa dirugikan oleh pihak PT. Tasmapuja dengan mengambil harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran belum lagi masyarakat akan membayar pemeliharaan perkebunaan kepada PT. Tasmapuja.

Atas dasar pemikiran ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tasmapuja dan peran Pemerintah terkait dengan lahan perkebunan yang dikuasai dari kajian hukum dan menuangkannya dalam sebuah proposal dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT. Tasmapuja Dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunaan Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.”**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis menetapkan batasan masalah tentang pelaksanaan perjanjian

kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Sedangkan yang menjadi Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap lahan perkebunan yang dikuasai.
2. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, dalam mengatasi permasalahan lahan perkebunan yang dikuasai serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merasa dirugikan.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahannya dalam penelitian ini, dengan metode sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam *Observasional Research*, dengan cara survey, yaitu penelitian lapangan yang mempergunakan data berupa wawancara.⁵ Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran secara sistematis dan terperinci mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perkebunan Pada PT. Tasmapuja Kabupaten Kampar Kecamatan Kampa.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan judul karena PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam melaksanakan perjanjian pemeliharaan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga masyarakat merasa dirugikan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan salah satu faktor indikasi menentukan objek yang akan diteliti. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga dapat

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Tasmapuja Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁷ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sample	(%)
1	Dewan Komisaris	1	1	100%
2	Administratur	1	1	100%
3	Petani yang melaksanakan perjanjian pemeliharaan perkebunan dengan PT. Tasmapuja	10	3	33%
Jumlah		12	5	-

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden, sehubungan dengan pembahasan penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.95

⁷ Arikunto. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. hlm. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

- b. Data Sekunder yaitu dokumen yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku literature, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.
- c. Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang

diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.⁸

Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat

⁸ Soekmono, R. 1973. 5th reprint edition in 1988. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, 2nd ed. Yogyakarta: penerbit kenisius. ISBN 979-4132290X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah diimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

2. Geografi

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

3. Pemerintahan

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kamparterdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur H. Jefry Noer dan Wakil Gubernur H. Ibrahim Ali SH, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk jabatan 2011-2016.2 Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- a. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
- b. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
- c. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
- d. Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
- e. Kampar (ibu kota: Air Tiris)
- f. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
- g. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
- h. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
- i. Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
- j. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
- k. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
- l. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
- m. Salo (ibu kota: Salo)
- n. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
- p. Tapung (ibu kota: Petapahan)
- q. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
- r. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
- s. XIII Koto Kampar (ibu koto: Batu Besurat)
- t. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
- u. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

4. Demografi

Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, piliong/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekt dengan masyarakat Minangkabau.⁹

5. Perekonomian

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama dibidang pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja disektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan instruktur seperti jaringan jalan raya,

⁹ Purna, I. M. Sumarsono, Astuti, R, Sunjata. 1997. *Sistem pemerintahan tradisional di Riau*. Departement Pendidikan dan Kebudayaan

jaringan listrik dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) DI Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antar lain layanan telekomunikasi an jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m3.

B. Profil Perusahaan

1. Sejarah PT. Tasmapuja

PT. Tasma Puja merupakan sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertanian atau agribisnis, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini mempunyai areal kerja di Kebun Sungai Kuamang Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 30 mei 1991 dan mempunyai kantor di Jl. Ahmad Yani No 116 Pekanbaru-Riau. Perusahaan ini juga memiliki unit pengolahan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah 30 ton/jam, dengan komoditi yang dihasilkan berupa CPO (Cruide Palm Oil) dan palm kernel dengan sumber TBS berasal dari kebun inti, plasma dan pihak ke 3.

Selain kebun inti PT. TASMA PUJA juga melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat melalui KUD (Kantor Unit Desa) untuk membangun kebun plasma seluas 3.000 Ha yaitu kebun yang setengah lahannya adalah milik masyarakat setempat dan pembangunan, pembimbingan teknisnya dilakukan oleh PT. Tasma Puja. Kerjasama yang dilakukan menggunakan sistem BA 3 (Bapak Angkat Anak Angkat). KUD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewakili dalam kerjasama ini adalah KUD Kampar seluas 1.500 Ha dan KUD Tunas Harapan seluas 1.500 Ha.

Selain pembangunan kebun masyarakat, bentuk lain menjaga hubungan baik adalah dengan pemberian bantuan berupa CSR (Cooperate Social Responsibility) kepada pembangunan sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum dan sosial lainnya. Juga ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti sunat masal, penyantunan anak yatim dan lainnya.

2. Visi, Misi Dan Motto Perusahaan

a. VISI

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan rumusan awal berdirinya PT. Tasma Puja Sei Kuamang Kampar mempunyai misi yaitu “Menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan terus berkembang berorientasi pada pembangunan industri perkebunan yang berkelanjutan

b. MISI

Untuk mewujudkan Visi diatas, PT. Tasma Puja mempunyai misi yaitu:

- 1) Membangun bisnis perkebunan secara profesional
- 2) Melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- 3) Menggunakan teknologi maju dan ramah lingkungan
- 4) Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional jujur dan disiplin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. MOTTO

PT. Tasma Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar memiliki motto “Bekerja berarti melakukan penyempurnaan untuk perusahaan dan tidak ada hari tanpa penyempurnaan”.

3. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang beroperasi baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta haruslah mempunyai struktur organisasi karena dengan adanya struktur organisasi, setiap personil yang ditugaskan pada jabatan yang dipegangnya mengetahui tugas dari tanggung jawabnya serta kepada siapa ia harus melimpahkan wewenangnya agar pekerjaan tersebut lebih mudah dilaksanakan. Dalam mengorganisir suatu kegiatan, langkah pertama adalah menetapkan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan.

Pola yang ditetapkan ini disusun dalam bentuk suatu organisasi perusahaan yang merupakan alat untuk membantu pihak manajemen dalam upaya merealisasikan tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan yang lain, perbedaan struktur organisasi diantara berbagai perusahaan disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis, luas perusahaan, banyaknya cabang-cabang dan lain-lain.

Penyusunan struktur organisasi digambarkan hubungan antara fungsi wewenang serta tanggung jawab setiap orang atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Adapun struktur organisasi yang digunakan dalam perusahaan ini adalah struktur organisasi garis (*Line Organization*). Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk struktur organisasi ini disebut juga bentuk lurus, dimana bentuk struktur organisasi ini adalah struktur organisasi yang sangat praktis karena tata hubungannya sangat sederhana.

Kebaikan struktur organisasi dalam bentuk line adalah:

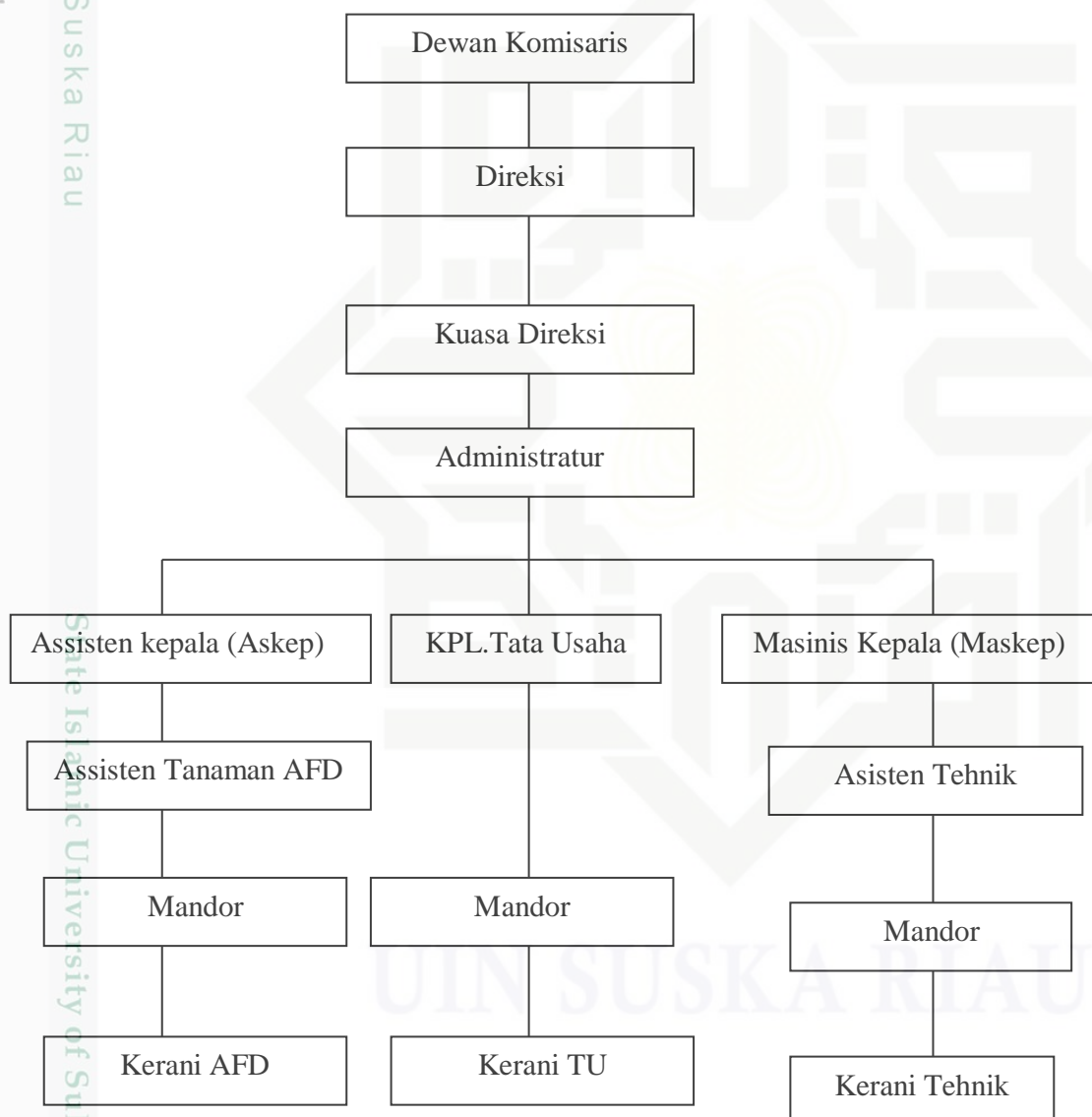
- a. Struktur sangat sederhana dan stabil
- b. Disiplin mudah dipelihara
- c. Persatuan komando akan terjamin dengan baik
- d. Kekuasaan dan tanggung jawab ditetapkan secara definitive
- e. Pengawasan berjalan lebih efektif
- f. Adanya penghematan dalam biaya
- g. Orang yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab diketahui semua pihak
- h. Semua perintah atasan mudah dimengerti dan dilaksanakan
- i. Keputusan dapat diambil secara cepat
- j. Tersedianya kesempatan baik untuk latihan bagi pengembangan bakat pimpinan.

Kelemahan dari bentuk line:

- a. Pembebanan yang berat dari pejabat pemimpin karena dipegang sendiri
- b. Dalam menjalankan kekuasaannya akan bersifat otokratis dan birokratis
- c. Cenderung bersifat kaku
- d. Bakat para bawahan sulit berkembang karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri
- e. Memungkinkan lebih mendahulukan kepentingan bagian dari kepentingan organisasi secara keseluruhan

Pada PT. Tasma Puja didalam upaya merealisasikan tujuan yang ditetapkan, dalam hal pemberian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada anggotanya dapat dilihat pada struktur organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Tasma Puja Kampar dapat kita lihat berikut ini :

Bagan II. 1
Struktur Organisasi PT. Tasma Puja Kampar



Sumber : PT. Tasma Puja Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas, wewenang serta tanggung jawab dari setiap anggota organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Bertugas mengawasi jalannya aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh Direksi atau Kuasa Direksi agar sesuai dengan tujuan perusahaan, disamping juga berfungsi sebagai staff yang juga memberikan masukan-masukan bagi direktur atau kuasa direktur dalam mengambil keputusan.

b. Direksi atau Kuasa Direksi

Sebagai puncak pimpinan, maka bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran operasional perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam tugasnya ini membagi tugasnya mencakup tugas intern dan ekstern, untuk tugas intern dilaksanakan langsung oleh Direktur namun untuk tugas ekstern dibantu oleh kuasa direksi, disamping itu direksi mempunyai fungsi :

- 1) Menentukan kebijakan umum perusahaan dalam rangka peningkatan kemampuan perusahaan dalam berproduksi.
- 2) Mendelegasikan wewenang kepada masing-masing kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- 3) Menerima laporan pertanggung jawaban dari masing-masing kepala bagian.
- 4) Memberikan kepuasan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Administratur (ADM)

Adalah pimpinan proyek yang bertanggungjawab kepada direksi dan membawahi Asisten Kepala, tugasnya adalah :

- 1) Menjalankan kebijaksanaan Direksi/ Perusahaan dibidang teknik kultural dan eksploitasi produksi yang menunjang tercapainya standar pertanaman dengan yang prima dan efesiensi guna menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.
- 2) Menjalankan kebijaksanaan Direksi dalam manajemen tanaman/pabrik.
- 3) Menyusun program kerja tahunan kebun/pabrik berdasarkan keadaan kebun/pabrik dan norma-norma yang berlaku.
- 4) Memelihara hubungan baik dengan pejabat maupun instansi dan masyarakat sekitar lokasi perkebunan/pabrik.

d. Asisten Kepala

Asisten kepala membawahi asisten tanaman/afdeling yang bertanggungjawab langsung kepada administrateur, tugas asisten kepala adalah :

- 1) Membantu Administratur dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan serta mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan di afdeling-afdeling.
- 2) Melakukan pelaporan hasil pengawasan atau pekerjaan langsung kepada administrator
- 3) Mengkoordinir pembuatan program kerja bulanan di Afdeling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sebagai wakil administrateur untuk berhubungan dengan pihak luar apabila administratur berhalangan untuk hadir.

e. Masinis Kepala

Masinis Kepala bertugas mengepalai Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta bertanggungjawab langsung kepada administratur tentang kelancaran proses pengolahan buah kelapa sawit dan bertanggungjawab terhadap keadaan dan kondisi pabrik secara umum.

f. Assistent Afdeling/ Tanaman

Assisten Afdeling atau tanaman mengepalai satu unit Afdeling dan membawahi krani dan mandor. Tugas dari assstent afdeling adalah:

- 1) Mengatur dan mengawasi pelaksana pekerja di Afdelingnya.
- 2) Melakukan pelaporan hasil pengawasan pekerja Afdelingnya kepada Assisten kepala.
- 3) Mempunyai hubungan vertikal (garis komando) dengan assisten kepala. Dan hubungan horizontal dengan assisten afdeling lainnya.
- 4) Membuat program kerja kebun dan anggaran biaya serta membuat daftar upah, daftar premi karyawan afdeling.
- 5) Kemasyarakatan

g. Kepala Tata Usaha

Dilihat dari struktur organisasi yang ada Kepala Tata Usaha berkedudukan langsung dibawah Administratur yang berarti dia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung bertanggung jawab kepada Administratur. Tugas dari Kepala Tata Usaha ini adalah :

- 1) Mengatur, memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan pelaksanaan pekerja dibidangnya.
- 2) Mengumpulkan semua anggaran fisik bagian Afdeling, mengelola dan menyusunnya kedalam anggaran perusahaan baik anggaran tahunan maupun bulanan.
- 3) Mengatur pembagian kerja dan melengkapi peralatan kerja secara teratur dan terpadu.
- 4) Membina hubungan kerja sama dengan Afdeling secara teratur dan terpadu dalam memperlancar kegiatan administrasi perusahaan secara keseluruhan.

h. Assisten Teknik

Assisten Teknik terbagi 2, yaitu Assisten Teknik Pabrik dan Assisten Teknik Umum. Assisten Teknik Pabrik bertugas menangani instalasi pabrik (segala kegiatan pabrik) dan kolom limbah. Sedangkan Assisten Teknik Umum bertugas menangani kegiatan teknik diluar pabrik, seperti jalan, jembatan dan jaringan listrik.

i. Mandor

Para mandor berkewajiban untuk hal-hal:

- 1) Mencatat kehadiran karyawan pada buku mandor.
- 2) Merencanakan dan membagi pekerjaan kepada karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengisi buku mandor setiap hari kerja sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 4) Memonitor atau mengawasi kegiatan/pekerjaan karyawan sesuai dengan pembagian pekerjaan/jenis pekerjaan.
- 5) Membuat laporan atas hasil pekerjaan kepada asisten setiap hari
- 6) Bertanggung jawab kepada asisten/asisten kepala

j. Kerani

Para kerani berkewajiban untuk melaksanakan :

- 1) Membuat atau menyusun rencana anggaran belanja bulanan (RAB-B) phisik.
- 2) Membuat atau menyusun rencana kerja harian (Master Ship).
- 3) Meneliti buku mandor dan memindahkan hari kerja karyawan ke buku asisten.
- 4) Membuat daftar kumpulan laporan kerja harian.
- 5) Membuat daftar upah karyawan.
- 6) Membuat laporan mingguan.
- 7) Membuat laporan bulanan.
- 8) Bertanggung jawab kepada asisten

4. Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah diketahui bahwa organisasi adalah merupakan suatu wadah dari manajemen, sedangkan manajemen merupakan aktivitas yang dijalankan oleh seorang pimpinan untuk membuat semua bawahan melakukan segala sesuatu yang harus mereka laksanakan, baik secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan usaha yang dipimpinnya dan menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Untuk mendukung aktivitas perusahaan tersebut diatas, diperlukan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan yang ada dalam perusahaan.

Status jabatan atau kepegawaian yang berlaku diperusahaan PKS PT. Tasma Puja Kampar tunduk pada peraturan Menteri Pertanian. Dalam struktur organisasi dan pembagian tugas yang terdapat di PKS PT. Tasma Puja Kampar dapat kita lihat adanya suatu pembagian tugas mulai dari pucuk pimpinan sampai apda satuan organisasi yang terbawah. Keadaan ini membutuhkan orang-orang yang benar menjalankan fungsi manajemen dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidangnya masing-masing. Dengan adanya pengelompokan tugas masing-masing satuan organisasi dengan dilengkapi perincian tugas yang jelas, maka pimpinanlah yang sangat menentukan akan pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Aktivitas PKS PT. Tasma Puja Kampar ini adalah melaksanakan proses produksi minyak kelapa sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) yang bahannya berasal dari Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari lahan Perkebunan milik PT. Tasma Puja Kampar itu sendiri dan perkebunan Plasma. Dalam melaksanakan kegiatan produksi ini pihak perusahaan berupaya meningkatkan rencana produksi setiap tahunnya, sesuai dengan perkembangan produksi lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam untuk produksi minyak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

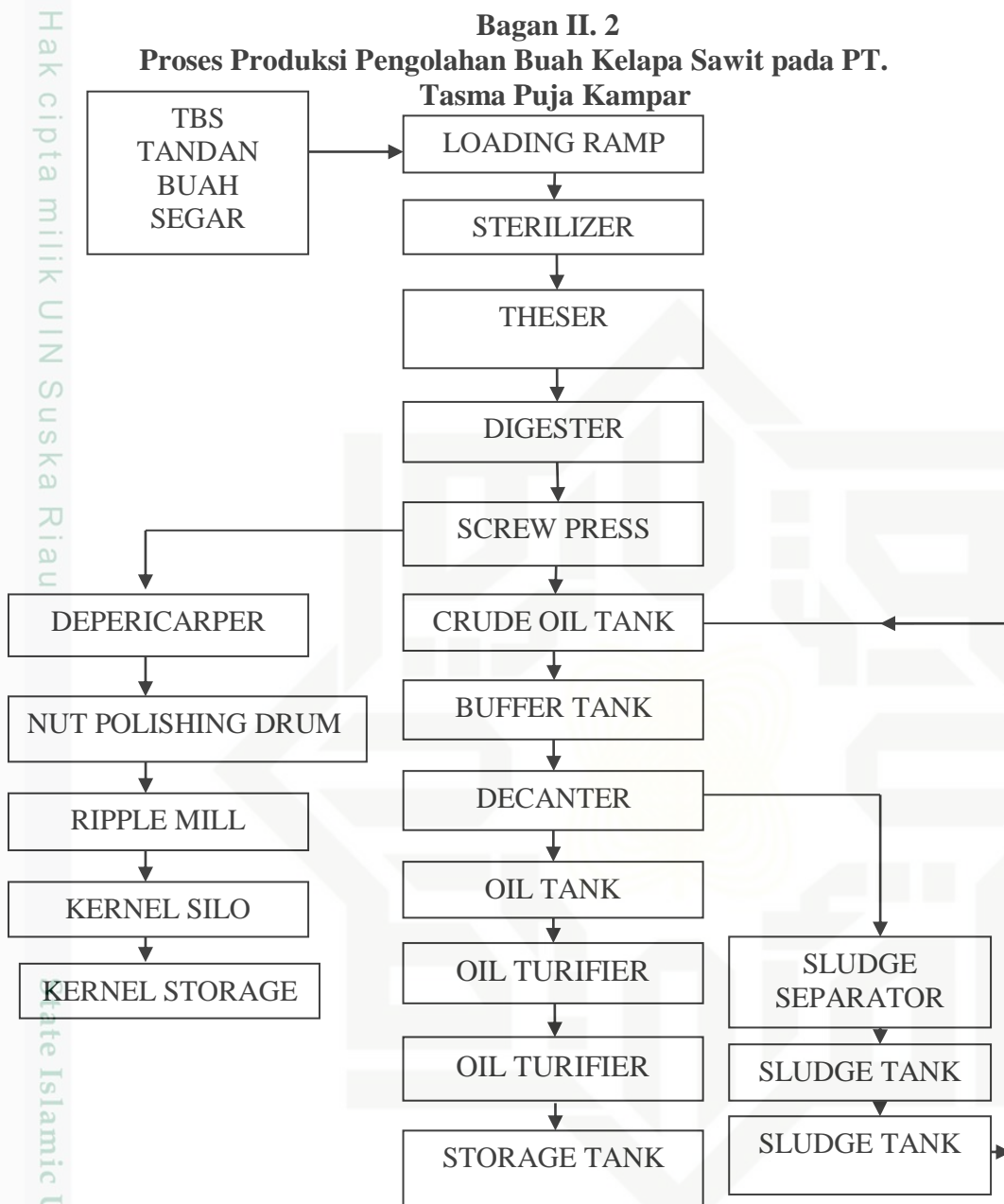
Proses pengolahan buah kelapa sawit mulai dari masuknya Tandan Buah Segar (TBS) kedalam *loading ramp* (Lori tempat memuat TBS), kemudian dibawa keunit *strellizer* (Stasiun perebusan), selanjutnya setelah TBS drebuskan atau disterilkan lalu dikirim ke stasiun penebah (*Thresher*). Disini brondolan TBS dipisahkan dengan tangkai, setelah dipisahkan kemudian dari proses ke stasiun pelumatan (*Digester*), pada unit pengolahan ini buah yang telah dilumatkan di stasiun pelumatan (*Diester*) diposes dengan tekanan udara/uap atau disuling.

Dari unit pressing ini akan dihasilkan dua macam produk, yang pertama minyak yang bercampur dengan sampah atau lumpur kelapa sawit yang kemudian dikirim ke unit-unit klarifikasi (Stasiun pemurnian minyak kelapa sawit). Dari sini hasil yang berupa CPO (minyak sawit) dikirim tangki timbun (*Storage tank*) dan lumpur akibat sisa pemurnian minyak dikirim ke bak lumpur yang akhirnya akan dimasukkan kedalam stasiun pengolahan limbah pabrik. Hasil yang kedua berupa biji dan ampas (sisa-sisa daging buah) dari buah kelapa sawit dteruskan ke stasiun-stasiun pengolahan biji, barulah didapatkan kernel (Inti Sawit). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses produksi pengolahan buah kelapa sawit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : PT. Tasma Puja Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.¹¹

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹²

¹⁰ Projodikoro, Wiryono. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. hlm. 9.

¹¹ Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm.1.

¹² M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Rahmat Setiawan mengemukakan bahwa, Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat kelemahan dan dianggap belum lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga perumusannya menurut beliau menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁴

Adapun pengertian perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini,

¹³ Setiawan, Rahmat. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. hlm.49.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaaneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perjanjian diatas, bahwa suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas masih terdapat ketidakjelasan di dalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum atau tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban. Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁶

¹⁶ Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 15.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek, dan;
4. Adanya kausa yang halal.

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini :

1. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang- Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengamuan, dan
- c) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.¹⁷

Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (*nietig, void*).¹⁸

4. Adanya Causa Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang- Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat

¹⁷ Salim HS. *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*. *Op.Cit.* hlm. 34

¹⁸ Abdulakdir. hlm. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁹

C. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

¹⁹ Salim HS. hlm. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cakap untuk itu”.

4. Asas Obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*). Hukum perdata Prancis tidak mengenal perjanjian obligator. Perjanjian yang dibuat itu sekaligus bersifat *zakelijk*, yaitu memindahkan hak milik. Hukum perdata Prancis tidak mengenal lembaga penyerahan (*levering*). Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi perjanjian jual beli, secara otomatis hak milik beralih dari penjual kepada pembeli tanpa melalui penyerahan (*levering*).²⁰

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yaitu bahwa: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan

²⁰ *Ibid.* hlm. 295-296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan itikad baik”. Itikad baik dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas itikad baik apabila para pihak bersikap jujur serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum.

Mariam Darus Badruzaman, menjelaskan delapan asas-asas hukum perjanjian, yaitu :

1. Asas Kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.
2. Asas Persamaan Hukum, bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
3. Asas Keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Asas Kepastian Hukum, bahwa perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. Asas Moral, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
6. Asas Keadilan, yaitu tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
7. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian.
8. Asas Perlindungan, bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

D. Unsur-Unsur Perjanjian

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsure yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.”
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²¹

²¹ Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. hlm. 118-119.

E. Akibat Perjanjian Yang Sah

Suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sah Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat sah di luar Pasal tersebut, akibat hukumnya adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²²

Maksud ketentuan “Berlaku sebagai Undang-Undang”, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dia dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).

Maksud ketentuan “Pelaksanaan dengan itikad baik”, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran” atau “kebersihan” si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu

²² Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.²³

F. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelasan terhadap kewajiban pokok. Dengan perkataan lain, kewajiban pokok bersifat fundamental essencial, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat formal procedural. Pada kewajiban utama

²³ Abdulkadir. hlm. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(pokok), jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak milik atas benda, melakukan pekerjaan tertentu, pelayanan jasa, pembayaran sejumlah uang harga benda dan upah pelayanan jasa.

1. Kewajiban Pokok, Kewajiban Pelengkap, Kewajiban Diam-Diam

a. Kewajiban pokok

Kewajiban pokok adalah kewajiban *fundamental essencial* dalam setiap perjanjian. Jika kewajiban pokok tidak dipenuhi, akan memengaruhi tujuan perjanjian. Pelanggaran kewajiban pokok akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau meneruskan perjanjian pokok merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, bergantung pada pemenuhan kewajiban pokok.

b. Kewajiban Pelengkap

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang penting, yang sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok (*formal procedural*). Tidak ditaati kewajiban pelengkap tidak akan memengaruhi tujuan utama perjanjian dan tidak akan membatalkan atau memutuskan perjanjian, tetapi mungkin hanya menimbulkan kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kewajiban Diam-Diam

Kewajiban diam-diam dalam perjanjian hanya terjadi dalam hal tidak ada ketentuan tegas. Akan tetapi, kewajiban diam-diam umumnya dapat dikesampingkan oleh kewajiban yang tegas mengenai akibat yang terjadi. Dalam perjanjian, pihak-pihak tidak begitu mengetahui adanya kewajiban diam-diam. Pengadilan memegang peranan penting untuk menunjukkan kewajiban diam-diam itu dalam putusannya. Selain pengadilan, Undang-Undang pun dapat menentukan kewajiban diamdiam. Dalam Pasal 1474 KUH Perdata ditentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan benda dan menjaminnya. Dalam Pasal ini tersimpul kewajiban pokok secara diamdiam bahwa apabila dalam perjanjian tidak dinyatakan secara tegas, disini undang-undang menunjukkan bahwa penjual berkewajiban secara diam-diam menjamin benda yang dijualnya itu.

2. Pembayaran

Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitur atau orang lain atas nama debitur, atas dasar surat kuasa khusus. Pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan suatu tempat, pembayaran mengenai benda yang sudah ditentukan harus dilakukan di tempat dimana benda itu berada ketika membuat perjanjian. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran dibebankan kepada debitur (Pasal 1395 KUH Perdata). Akan tetapi, pihak-pihak dapat juga memperjanjikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa biaya pembayaran dibebankan kepada kreditur atau oleh kedua belah pihak.

3. Penyerahan Benda

Setiap perjanjian yang memuat tujuan memindahkan penguasaan dan/atau hak milik perlu melakukan penyerahan bendanya (*levering, delivery*). Penyerahan ada dua macam, yaitu penyerahan hak milik (*levering van eigendom, delivery of ownership*) dan penyerahan penguasaan benda (*levering van bezit, delivery of possession*).

4. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu, baik dengan menggunakan tenaga fisik saja maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah maupun tanpa upah. Pelayanan jasa itu misalnya, *cleaning service*, reparasi, konveksi, pengangkutan barang, salon kecantikan, pekerjaan buruh, jasa konsultan atau pelayanan public lainnya.

5. Klausula Eksonerasi

Dalam perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan yang bersifat membatasi tanggung jawab debitur yang disebut “klausula eksonerasi”. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, parkir kendaraan, serta hal-hal yang dialami sehari-hari. dalam nota pembelian dijumpai klausula yang tertulis : “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Dalam klausula ini penjual membebaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan ada cacat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada benda itu sesudah dibeli. Apabila ada cacat ataupun rusak sesudah dibeli, benda itu tidak boleh dikembalikan lagi dan penjual tidak mau menerimanya. Kerugian dibebankan kepada pembeli.²⁴

G. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perlunya dibahas mengenai perikatan adalah karena perikatan merupakan hal yang timbul akibat adanya perjanjian. Perikatan yang membuat orang terikat untuk melaksanakan suatu perjanjian. Istilah perikatan dengan perjanjian memiliki pengertian yang tidak selalu sama dengan perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari undang-undang. KUHPerdata tidak memberikan definisi yang tegas dari perikatan, namun Pasal 1313 KUHPer memberikan definisi dari perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1233 KUHPer ditegaskan bahwa “Perikatan selain dapat dilahirkan dari undang- undang juga dapat dilahirkan dari perjanjian.”

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer maka terlihat bahwa perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri. J.Satrio menyatakan pendapatnya bahwa “Perikatan

²⁴ *Ibid.* hlm. 307-312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi maka prestasi perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim.”²⁵

2. Unsur- Unsur Perjanjian Kerjasama

Herlien Budiono menguraikan hal-hal pokok dari perjanjian adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang - undangan;

3. Hubungan Hukum

Hubungan hukum yang dimaksud berlainan pada hak kebendaan, namun merupakan hubungan antara dua pihak, antara orang dengan orang mengenai benda. Pada perikatan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela maka kreditur dapat meminta bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Khusus mengenai hubungan hukum perlu

²⁵ J.Satrio. hlm. 5

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perutangan Bagian A dan Bagian B*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum-UGM. hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambahkan penjelasan dari Gunawan Widjaja menyatakan bahwa hubungan hukum menunjuk pada dua hal yakni pertama menunjuk pada keadaan yang wajib harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, kedua berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Berdasarkan pemikiran ini bahwa setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan dari perikatan.²⁷

4. Dalam Lapangan Harta Kekayaan

Menurut J.Satrio, Perikatan yang dinilai dengan nilai uang atau paling tidak dapat dijabarkan dalam sejumlah uang atau nilai ekonomis tertentu jika debitur wanprestasi maka kreditur harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial, agar ia dapat menuntut debitur berdasar Buku III KUHPer Pengganti dari prestasi yang terhutang adalah ganti rugi, yang pada umumnya diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu.²⁸

5. Adanya Pihak-Pihak (Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur)

Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu aktiva dan pasiva. Segi aktiva di dalamnya ada hak- haknya yang berupa tagihan yang kalau dihubungkan dengan subyeknya ada pada kreditur.

²⁷ Gunawan Widjaja. 2007. *Seri Hukum Bisnis. Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 313

²⁸ J.Satrio. hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segi pasiva yang didalamnya ada kewajiban berupa hutang dihubungkan dengan subyeknya ada pada debitur. Pada bagian segi passiva, terdapat perbedaan antara schuld dan haftung. Schuld adalah kewajiban berprestasinya, yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk menjalankan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban wajib dipenuhi (kreditur). Haftung berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Kedua hal ini (schuld dan haftung) tampak pada debitur dalam pemenuhan prestasinya sebagai harga pembayaran barang yang dibeli dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh penjual untuk memenuhi kewajibannya.²⁹

6. Prestasi Sebagai Isi Perikatan.

Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan ditujukan agar dapat menilai apakah debitur telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Prestasi dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

7. Jenis-Jenis Perjanjian Kerjasama

Undang-undang dalam Buku III Bab I KUHPer, membedakan jenis perikatan menjadi enam yakni :³⁰

- a. Perjanjian kerjasama untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu

²⁹ *Ibid.* hlm. 20

³⁰ Mariam Darus Badruzaman. hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perjanjian kerjasama bersyarat;
- c. Perjanjian kerjasama dengan ketetapan waktu;
- d. Perjanjian kerjasama mana suka;
- e. Perjanjian kerjasama tanggung menanggung;
- f. Perjanjian kerjasama dengan ancaman hukuman.

8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Titel ke 4 Buku III KUHPerdara. Masalah "hapusnya perjanjian" (*tenietgaan van verbintenit*) bisa juga disebut "hapusnya persetujuan" (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur da debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian,persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.

Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, suatu perjanjian berakhir dikarenakan:³¹

³¹ M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;
- c. Pembaharuan utang (novasi);
- d. Perjumpaan utang (kompensasi);
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal/Pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya pemeliharaan perkebunan salah satunya adalah disebabkan oleh factor ekonomi masyarakat dulu yang beranggapan kerjasama dengan Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik, seiring berkembangnya permasalahan muncul pada saat pihak Perusahaan yaitu PT. Tasamapuja tidak dapat lagi menjalankan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini pihak Perusahaan sudah melakukan wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya,
2. Adapaun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yaitu tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa dan kecamatan maupun Dinas yang terkait, dan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan, yang paling penting adalah faktor kuatnya sistem kekeluargaan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan terhadap seseorang.

3. Selain hambatan terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berikut ini upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum memberikan pendekatan kepada masyarakat dan petani dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum, selain diatas juga dapat dilakukan dengan sosialisasi khususnya mengenai pengelola dan pemeliharaan Perkebunan.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Dinas Perkebunan untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam untuk pelaksanan pengelola dan pemeliharaan Perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Sebaiknya bagi perusahaan dalam hal pelaksanaan perjanjian pelaksanaan pemeliharaan perkebunan yang dilakukan pihak perusahaan PT. Tasmapuja dengan masyarakat jangan dilakukan melalui lisan semata, karena hasil dari perkebunan merupakan mata pencarian bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan lain.

3. Untuk masyarakat dalam hal pelaksanaan pemeliharaan perkebunan agar lebih teliti lagi dalam melakukan perjanjian dan lebih memahami lagi akan peraturan dan konsekuensi yang terjadi atas apa yang dilakukan dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, 2005, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dwimas Suryanata Nugraha. 2018. Vol.20 No.1 *Jurnal Ilmu Hukum*. Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. Universitas Diponegoro
- Gunawan Widjaja. 2007. *Seri Hukum Bisnis. Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ilyas Ismail. 2012. Vol.14 No.3. *Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Miru,Ahmadi. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan
- Projodikoro, Wiryono. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Purna, I. M. Sumarsono, Astuti, R, Sunjata. 1997. *Sistem pemerintahan tradisional di Riau*. Departement Pendidikan dan Kebudayaan
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (buku kesatu). Jakarta : Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiawan, Rahmat. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres

Soekmono, R. 1973. 5th reprint edition in 1988. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, 2nd ed. Yogyakarta: penerbit kenisius. ISBN 979-4132290X

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perutangan Bagian A dan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum-UGM.

Subekti,R,Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bogor: Politeia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1: Daftar Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
 2. Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara PT. Tasmapuja dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
 3. Alasan apa yang menjadikan pengelola atau pemeliharaan perkebunan kelapa sawit di berikan kepada PT. Tasmapuja?
 4. Bagaiamanakah bentuk perjanjian dalam pengelola atau pemeliharaan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Tasmapuja?
 5. Adakah saksi pada saat melakukan perjanjian pemeliharaan atau pengelola perkebunan kelapa sawit antara PT. Tasmapuja dengan para pihak atau masyarakat yang melakukan perjanjian?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “PELAKSAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh :

Nama : **M. KHUDRI**
 NIM : 11327100842
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 09 September 2020**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Daring**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Muslim, S.Ag., SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25526
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6951/2019 Tanggal 23 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **M. KHUDRI**
2. NIM / KTP : **11327100842**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KAMPAR**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **PT. TASMAPUJA KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/19

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25526 tanggal 28 Agustus 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. KHUDRI |
| 2. NIM | : | 11327100842 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | KAMPAR |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | PT. TASMAPUJA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 8 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampa di Kampar.
2. Sdr. Pimpinan PT. Tasmapuja Kab. Kampar.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084
KAMPAR – 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/CKT-PEM/K.01/...

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kampa di Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : **M. KHUDRI**
2. No.Mhs : 11327100842
3. Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM
4. Universitas : UIN SUSKA RIAU
5. Jenjang : SI
6. Alamat : KAMPAR
7. Judul Penelitian : **“ PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMA PUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR .”**

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di PT. TASMA PUJA Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam rangka memenuhi kewajiban/ tugas-tugas dalam melakukan/ menyelesaikan Studi jenjang Strata Satu (S-1).

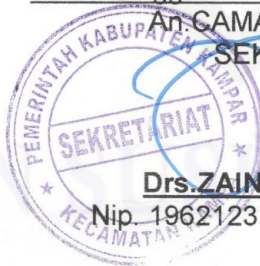
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampa
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

An. CAMAT KAMPA
SEKCAM

Drs. ZAINAL ARIFIN

Nip. 19621231 199303 1 056



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

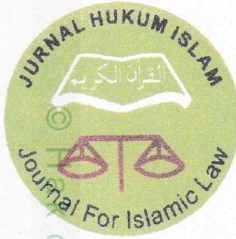
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

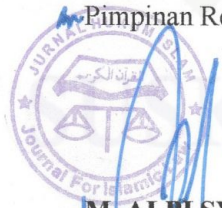
NAMA : M. KHUDRI
NIM : 11327100842
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT. TASMAPUJA DENGAN MASYARAKAT DALAM HAL PEMELIHARAAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing: Mhd. Kastulani, SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



M KHUDRI biasa di panggil Khudri lahir di Padang luas, 10 November 1994, anak pertama atau tunggal dan merupakan anak dari pasangan Bapak Muhrir dan ibu Yusmanidar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 032 Jawi - Jawi pada tahun 2001 sampai tahun 2007. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Kampar Timur dan menyelesaikannya tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) di SMAN 1 Kampar Timur yang selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri, dan penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada bulan Januari 2015, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Hukum Asep Ruhiat. Pada bulan Juli sampai Agustus 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pulau Rambai, Kec. Kampa, Kab. Kampar.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “ *pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara pt. tasmapuja dan masyarakat dalam hal pemeliharaan perkebunan di kecamatan kampa kabupaten kampar*”. Akhirnya tepat pada hari senin pada tanggal 09 September 2020 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Hukum (SH).